

PERAN PARTAI ACEH TERHADAP PENDIDIKAN POLITIK DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Nafis Siddiq
NPP. 30.0032

Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 30.0032@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dewi Safitri, SH. MH

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The problems observed are what is the role of the Aceh Party in providing political education and what are the supporting and inhibiting factors of the Aceh Party's efforts to provide political education in the city of Lhokseumawe, Aceh province. **Purpose:** The purpose of this research is to find out and examine how the Aceh Party plays a role in political education in the city of Lhokseumawe, Aceh province. **Method:** The research method used is a qualitative research method, with a deductive approach. Data collection techniques used by researchers in this study were interviews and documentation techniques. In this study the authors used the role theory of Soerjono Soekanto which divides roles into three types, namely factual roles, ideal roles and normative roles. **Result:** The results of the study show that the role of the aceh party in carrying out political education in the city of Lhokseumawe, Aceh Province, has been going well from the factual and ideal dimensions, but in terms of the normative dimension it is still not optimal. **Conclusion:** The role of the Aceh Party in carrying out political education is still not optimal because the quality of education for some members or cadres of the Aceh party is still minimal, besides that there are obstacles encountered in the process, namely in terms of access to areas that are too far away as well as the quality of human resources which is still minimal and the budget limited. **Keywords:** Qualitative, Aceh Party, Political Education

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masalah yang diamati yaitu bagaimana peran Partai Aceh terhadap pemberian pendidikan politik dan apa faktor pendukung dan penghambat dari upaya Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik di kota Lhokseumawe provinsi Aceh. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran Partai Aceh terhadap pendidikan politik di kota Lhokseumawe provinsi Aceh. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran dari soerjono soekanto yang membagi peran dalam tiga jenis yaitu peran faktual, peran ideal dan peran normative. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partai aceh dalam melaksanakan pendidikan politik di kota Lhokseumawe Provinsi Aceh sudah berjalan dengan baik dari dimensi faktual dan dimensi ideal, namun dari segi

dimensi normative masih kurang optimal. **Kesimpulan:** Peran Partai Aceh dalam melaksanakan pendidikan politik masih kurang optimal dikarenakan kualitas pendidikan sebagian anggota ataupun kader partai aceh masih minim, disamping itu adanya hambatan hambatan yang ditemui dalam prosesnya yaitu dari segi akses wilayah yang terlalu jauh juga kualitas SDM yang masih minim serta anggaran yang terbatas.

Kata kunci: Kualitatif, Partai Aceh, Pendidikan Politik

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah dinyatakan dalam pasal 11 ayat 1 huruf a, yang berbunyi: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Pendidikan politik wajib dilaksanakan oleh partai politik tidak hanya diberikan kepada partai politik itu sendiri, melainkan kepada seluruh elemen yang ada di masyarakat, karena pada hakekatnya partai politik mendapat bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk diprioritaskan dalam melaksanakan pendidikan politik.

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapat keistimewaan untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pemerintah RI tetapi tetap dalam lingkup NKRI dan tetap mendukung tujuan dari pemerintah Indonesia. Awalnya, Aceh mendapat status sebagai daerah istimewa pada tanggal 26 mei 1959 dengan sebutan Daerah Istimewa Aceh. Predikat tersebut membuat Aceh memiliki hak-hak luas dalam bidang ekonomi, agama, adat dan pendidikan. Perubahan tersebut menyebabkan terjadinya gejolak politik yang berakibat terangnya stabilitas keamanan. Pada tanggal 4 Desember 1976, muncul sebuah gerakan yang dipimpin oleh Hasan Tiro yang mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI. Gerakan yang sampai saat ini dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Munculnya partai politik lokal di Aceh merupakan hasil dari kesepakatan berdamainya pemerintah Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia, dan dari sini Aceh diberi keistimewaan untuk hidup mandiri dan mengatur baik ekonomi maupun politiknya. Inilah yang menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Peran partai politik khususnya partai politik lokal di Aceh dapat dibilang cukup besar mengingat sejak diperbolehkannya Aceh mendirikan partai politik lokal, sejak saat itu pula partai politik lokal mendominasi suara dan kekuasaan di Aceh mengalahkan partai politik nasional. Pendidikan politik juga diatur dalam Undang Undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang mewajibkan partai politik lokal untuk memberikan pendidikan politik kepada kader partai dan seluruh elemen di masyarakat.

Khususnya di kota Lhokseumawe, pendidikan politik dilaksanakan oleh Partai Aceh dengan cara sosialisasi terkait partai politik maupun fenomena politik yang sedang terjadi. banyak masyarakat awam di kota Lhokseumawe yang menganggap politik dengan konotasi negatif, sehingga mereka enggan berpartisipasi dalam event perpolitikan. Banyak masyarakat yang belum memahami arti dari politik itu sendiri yang menyebabkan kurangnya kesadaran terkait dengan politik. Sebagai salah satu partai politik lokal yang berkuasa Partai Aceh diharapkan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan para pejabat di lingkup Kota Lhokseumawe.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan partisipasi politik di Kota Lhokseumawe, hal itu disebabkan oleh adanya anggapan dari masyarakat awam terkait dengan politik yang seringkali dikaitkan dengan konotasi negatif, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan arti dari politik itu sendiri juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi.

Partai Aceh sebagai partai politik lokal yang berkuasa di Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe menjadi harapan bagi masyarakat dan pejabat di lingkup Kota Lhokseumawe untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mengingat pentingnya hal tersebut untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Lhokseumawe dan sangat berpengaruh terhadap jalannya sistem pemerintahan di Kota Lhokseumawe.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, hasil penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai referensi dan juga sebagai upaya peneliti dalam rangka menambah sumber pengetahuan terkait permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya: Penelitian Fattaqun (2017) dengan judul penelitian “Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam” yang berfokus pada menganalisis peran dari Partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam; Penelitian Andriansyah (2020) dengan judul penelitian “Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh” yang berfokus pada analisis peran dari partai politik lokal dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh; Penelitian Hermadi (2015) dengan judul penelitian “Implementasi Partai Politik Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Nanggroe Aceh Darussalam” yang berfokus pada menganalisa bagaimana penerapan partai politik lokal di Aceh dalam rangka mewujudkan demokratisasi; Penelitian Pratami (2020) dengan judul penelitian “Peran Partai Politik Lokal Sebagai Penguat Demokrasi Lokal di Aceh” yang berfokus pada analisa peran partai politik lokal sebagai penguat demokrasi di Aceh.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Partai Aceh terhadap pendidikan politik di Kota Lhokseumawe. Metodenya yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermadi (2015) yang menggunakan mix methods, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori peran dari Soekanto (2002:243) yang membagi peran dalam tiga jenis yaitu peran faktual, peran ideal dan peran normative.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana peran Partai Aceh terhadap pendidikan politik di kota Lhokseumawe provinsi Aceh.

II. METODE (5-10%)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deduktif. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang bersumber tidak langsung, bisa dari dokumen atau dari orang lain (Sugiyono, 2017: 67).

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang

terdiri dari Sekretaris Kesbangpol Kota Lhokseumawe, dua orang Kabid Politik Kesbangpol Kota Lhokseumawe, dua orang Anggota Partai Aceh, dan satu orang masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori peran dari Soekanto (2002:243) yang membagi peran dalam tiga jenis yaitu peran faktual, peran ideal dan peran normative.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam menganalisis peran Partai Aceh dalam pendidikan politik di Kota Lhokseumawe menggunakan teori peran dari Soekanto (2002:243) yang membagi peran dalam tiga jenis yaitu peran faktual, peran ideal dan peran normative Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Peran Faktual

Peran faktual merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam upaya memberikan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Aceh, Partai Aceh memiliki ragam kegiatan. Kegiatan tersebut bagi penulis merupakan bagian dari strategi Partai Aceh dalam memberikan pendidikan politik. Dari hasil temuan penulis di lapangan, beberapa upaya yang dilakukan oleh Partai Aceh dalam sosialisasi, bimbingan teknis dan pemberian edukasi kepada masyarakat di kota Lhokseumawe serta seminar dua arah.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan, diketahui bahwa pada dimensi peran faktual ini, Partai Aceh telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas dan peran mereka dalam memberikan pendidikan politik di kota Lhokseumawe, hal ini ditunjukkan dengan adanya program kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM Internal Partai Aceh maupun Masyarakat demi mewujudkan pendidikan politik yang baik di kota Lhokseumawe.

3.2. Peran Ideal

Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem. Dalam upaya pemberian pendidikan politik dan peran Partai Aceh dalam terhadap pendidikan politik, legalitas Partai Aceh dalam melakukan tindakan terkait partai politik ini sudah diatur di dalam undang undang no 2 tahun 2008 tentang partai politik, uu no 2 tahun 2011 tentang partai politik, serta dalam UUPA no 11 tahun 2006 tentang Pemberian Pendidikan Politik oleh Partai Politik Lokal di Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dilapangan, dapat diketahui bahwa dalam dimensi peran ideal Partai Aceh melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang Undang dan dalam memperoleh anggaran Partai Aceh juga telah sesuai dengan Undang Undang, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan terkait peran ideal Partai Aceh sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang yang berlaku.

3.3. Peran Normatif

Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada norma norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Tentu kita semua mengetahui bahwa pemerintahan dan kehidupan di Aceh erat kaitannya dengan syariat islam yang dimana nilai nilai islam dijadikan sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan apapun itu bentuknya, sehingga dalam pelaksanaan pendidikan politik pun Partai Aceh harus tetap memperhatikan norma tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi penulis dilapangan, diketahui bahwa dalam dimensi normative ini masih ada yang meragukan kualitas Partai Aceh dikarenakan tingkat pendidikan dan kualitas Partai Aceh itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa dalam dimensi normative

ini peran partai aceh sudah berjalan sesuai norma masyarakat aceh namun ada hal yang kurang optimal dalam anggapan masyarakat yaitu kualitas pendidikan dari anggota kader Partai Aceh itu sendiri walaupun tidak semuanya begitu.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama pada penelitian ini terkait dengan peran Partai Aceh dalam pelaksanaan pendidikan politik di Kota Lhokseumawe berdasarkan analisis dari teori peran Soekanto (2002:243) didapati bahwa Partai Aceh selaku partai lokal yang memberikan pendidikan politik sesuai tupoksinya yang terkandung dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dan UUPA no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dapat dikatakan sudah baik dari dimensi faktual dan dimensi ideal namun belum maksimal dalam dimensi normative yang ditunjukkan dari sebagian anggota partai yang memiliki kualitas pendidikan yang minim. Temuan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andriansyah (2020), Fattaqun (2017), dan juga Hermadi (2015) hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan fokus penelitian yang dibahas. Pada penelitian ini membahas peran Partai Aceh dalam pendidikan politik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Peneliti menemukan faktor pendukung dan penghambat bagi Partai Aceh dalam melaksanakan pendidikan politik diantaranya yakni, adanya antusiasme dari anggota partai, adanya legalitas yakni UU No.2 Tahun 2011, terbatasnya anggaran, SDM yang masih kurang berkualitas, serta akses yang sulit untuk ke gampong-gampong.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Partai Aceh selaku partai lokal yang memberikan pendidikan politik sesuai tupoksinya yang terkandung dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dan UUPA no 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dapat dikatakan sudah baik dari dimensi faktual dan dimensi ideal namun belum maksimal dalam dimensi normative yang ditunjukkan dari sebagian anggota partai yang memiliki kualitas pendidikan yang minim.

Faktor pendukung pelaksanaan pemberian pendidikan politik oleh Partai Aceh, utamanya disebabkan karena komitmen dari anggota partai yang antusias. selanjutnya adanya legalitas dalam melaksanakan tugasnya yakni UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Juga selanjutnya status Partai Aceh sebagai partai lokal yang menyebabkan masyarakat masih merasa memiliki terhadap Partai Aceh.

Faktor penghambat bagi Partai Aceh dalam melaksanakan tugasnya yang utama adalah terkait akses ke gampong gampong yang sulit ditempuh karena jarak yang jauh dan medan yang sulit. Selanjutnya terkait dengan anggaran yang terbatas serta persoalan SDM yang dinilai masih kurang tidak hanya bagi kader partai, juga masyarakatnya yang masih memiliki paradigma negatif terkait politik. Selain itu kendala internal yang terjadi juga terkadang menyulitkan Partai Aceh dalam melaksanakan tugasnya terkait pemberian pendidikan politik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Partai Aceh terhadap pendidikan politik di Kota Lhokseumawe untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lhokseumawe beserta jajarannya serta segenap pengurus Partai Aceh yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah, M. F. (2020). *Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh*. Malang: Universitas Islam Malang.

Fattaqun. (2017). *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian di Nanggroe Aceh Darussalam*. Medan: UIN Sumatera Utara.

Hermadi, F. (2015). *Implementasi Partai Politik Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jember: Universitas Jember.

Pratami, W. (2020). *Peran Partai Politik Lokal Sebagai Penguat Demokrasi Lokal di Aceh*. Medan: UIN Sumatera Utara.

Soekanto, S. (2002.). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

